



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembuatan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
10. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
11. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
12. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
14. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip
15. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
16. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kinerja Pemerintah Daerah.
17. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup

informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.

20. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna yang berhak.
21. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
22. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
23. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib disertai dengan daftar Arsipnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
 - c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi Publik sesuai dengan Klasifikasi dan akses Arsip Dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Pengamanan Arsip Dinamis; dan
- c. Klasifikasi keamanan dan pengaturan Akses Arsip.

BAB IV
KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. ketiga tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;

- d. Pengguna Internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. Pengguna Eksternal hanya dapat mengakses Informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa filling kabinet/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
- (4) Ketentuan pengguna, sarana dan prasarana penyimpanan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip.

- (2) Arsiparis/pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan Arsipnya.
- (3) Prosedur pengiriman Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 8

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Arsip Dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Arsip Dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. Arsip Dinamis pada lingkungan Badan, Dinas, dan Kantor;
- d. Arsip Dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Arsip Dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Arsip Dinamis pada organisasi atau lembaga yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja Daerah.

Pasal 9

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;

- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan Arsip seperti daftar Arsip vital dan daftar Arsip terjaga.

Pasal 10

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual, dan personal file;
- b. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
- e. Arsip dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- e. Arsip yang terkait dengan Rahasia atau data pribadi dan rekam medis pegawai;
- f. Arsip yang terkait *dengan memorandum of understanding*; dan
- g. daftar informasi yang dikecualikan/dirahasiakan.

Pasal 11

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan.

Pasal 12

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juni 2023



BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,




HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 WONOGIRI

PROSEDUR PENGIRIMAN ARSIP DINAMIS

NO	TINGKAT/DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1	2	3	4
	Biasa / Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus	Tidak ada prosedur khusus
2	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, pasword, dan lain-lain
3	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kualitas kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia 3. Menggunakan amplop dobel 4. Amplop segel, stempel rahasia 5. Konfirmasi tanda terima 6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.



BUPATI WONOGIRI,

IOKO SUTOPO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KETENTUAN PENGGUNA, PRASARANA DAN SARANA PENYIMPANAN ARSIP DINAMIS

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP			PRASARANA & SARANA
		ARSIP	ARSIP KONVESIONAL	ARSIP ELEKTRONIK	
1	2				
1	Biasa / Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	5
		3	4	5	6
		Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	Back up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autensitas arsip.
		4	5	6	7
		Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pelaksana kebijakan (Eselon III), pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.
2	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pelaksana kebijakan (Eselon III), pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	1. Back up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autensitas arsip. 2. File-file elektronik (termasuk data base) harus dilindungi terhadap pengguna internal atau eksternal
					8
					Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.
					1. Autentifikasi server. 2. Langkah-langkah keamanan dengan operating system khusus atau aplikasi khusus. 3. Firewall dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.



NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP										
		ARSIP KONVESIONAL		ARSIP ELEKTRONIK		PRASARANA & SARANA						
		ARSIP	PENGGUNA	ARSIP	PENGGUNA							
1	2											
3	Rahasia	<p>1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap 'RAHASIA' pada fisik arsip.</p> <p>2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia.</p>	4	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	5	Diperlukan prasarana dan sarana khusus	6	1. Back up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. 2. File-file elektronik (termasuk data base) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	7	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Autentikasi pengguna (nama pengguna/ password atau id digital)	8	1. Autentifikasi server; 2. Langkah-langkah keamanan dengan operating system khusus atau aplikasi khusus. 3. Firewall serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.

BUPATI WONOGIRI, 


JOKO SUTOPO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 29 Tahun 2023
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000	UMUM								
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHAN								
000.1.1	Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 2 Perjalanan Dinas Anggota DPRD 3 Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 2 Perjalanan Dinas Anggota DPRD 3 Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
000.1.5	Rapat Pimpinan antara lain: notula/risalah rapat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
000.1.6	Penyedia Konsumsi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas 1 Pengurusan kendaraan dinas 2 Pemeliharaan dan perbaikan 3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor a. Pertamanan/ Landscape b. Penghijauan c. Perbaikan Gedung d. Perbaikan Peralatan Kantor e. Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma f. Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
000.1.9	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer a. Perbaikan/pemeliharaan b. Pemasangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
000.1.10	Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan, penjagaan, dan pengawasan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas b. Laporan Ketertiban dan keamanan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
000.1.11	Administrasi pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
000.1.12	Administrasi pakalan dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
000.2	PERLENGKAPAN									
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan a. Data hasil inventarisasi dan penyimpanan b. Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor a. Data hasil pemeliharaan kantor b. Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
000.2.3	Distribusi a. Barang habis pakai b. Barang milik daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara, Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah - Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Terbatas	V	V	V	-	V	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
000.3	PENGADAAN									
000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
000.3.2	Pengadaan Langsung	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			1	2	3	4	5	6		
000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung / Lelang	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
000.3.4	Swakelola Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
000.3.6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Laporan Hasil	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
000.4	PERPUSTAKAAN									
000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka Serah simpan, pangkalan data Penerbit, Terbitan Internasional dan Regional Bibliografi dan Katalog	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.3	Koleksi Pustaka	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	V	V		V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.6	Layanan Perpustakaan a. Keanggotaan b. Peminjaman c. Pengembangan gemar baca	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.7	Kerjasama Perpustakaan a. MoU b. Perjanjian kerjasama c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan a. Pengembangan situs web b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia c. Program aplikasi perpustakaan d. Pangkalan data kepustakaan digital	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.10	Konserasi a. Perawatan Bahan Perpustakaan b. Perbaikan Bahan Perpustakaan c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000.4.12	Transformasi Digital	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.13	Kurasi Digital	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan a. Perpustakaan Umum b. Perpustakaan Khusus c. Perpustakaan Sekolah d. Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan
000.5	KEARSIPAN								
000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.2	Pembinaan Kearsipan a. Pengembangan Profesi Arsiparis b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis c. Penilaian Arsiparis d. Pemilihan Arsiparis Teladan e. Database Arsiparis f. Bimbingan Konsultasi Kearsipan g. Supervisi dan Evaluasi h. Database Bimbingan dan Konsultasi i. Fasilitas Kearsipan j. Lembaga/Unit Kearsipan teladan k. Jadwal Retensi Arsip	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pententu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis a. Penciptaan b. Pembekasan Arsip Aktif c. Penataan Arsip Inaktif d. Penggunaan e. Autentikasi Arsip Dinamis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.4	Program Arsip Vital	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.6	Penyusutan Arsip a. Pemindahan arsip b. Pemusnahan arsip c. Penyerahan arsip statis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.7	Alih Media Arsip	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis a. Data Base Pengelolaan Arsip Aktif b. Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis a. Akuisisi b. Pengharagaan dan imbalan c. Sejarah lisan d. Daftar pencarian arsip statis e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik f. Preservasi Preventif g. Preservasi Kuratif h. Autentikasi Arsip Statis i. Akses Arsip Statis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan

KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000.5.10	Jasa Kearsipan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Terbatas	V	V	V	V	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.5.15	Pengawasan Kearsipan a. Pengawasan Kearsipan Internal b. Pengawasan Kearsipan Eksternal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan
000.6	PERSANDIAN								
000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
000.6.2	Pengamanan persandian a. Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi b. Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi c. Materil sandi: sistem dan peralatan	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pententu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi a. Perencanaan Pengkajian b. Administrasi Pengkajian c. Pelaksanaan d. Pelaporan	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian a. Sumber Daya Manusia (SDM) b. Jaring Komunikasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik a. Perencanaan dan Administrasi b. Pelaksanaan Verifikasi c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama d. Penyesuaian Sistem dan Testing e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna f. Pelaksanaan Pemberian Sertifikat elektronik g. Pelaporan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
000.7.1	Musrenbang Kabupaten a. Musrenbang Kecamatan b. Musrenbang Kelurahan c. Musrenbang Desa d. Musrenbang Desa	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah a. Jangka Panjang b. Jangka Menengah c. Rencana Anggaran Daerah d. Rencana Pembangunan Tahunan e. Rencana Pembentukan OPD f. Program Kerja Tahunan g. Penetapan/kontrak kinerja h. Laporan berkala i. Laporan insidental j. Evaluasi program	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			1	2	3	4	5	6	7	8		
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan	
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan		
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan		
000.7.6	Aksi Strategis Daerah a. Rancangan awal perencanaan b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah c. Sosialisasi d. Rancangan akhir e. Penerapan	Terbatas	V	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan		
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan a. Pendanaan Nasional dan Hibah b. Pendanaan Daerah	Terbatas	V	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan		
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA											
000.8.1	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
000.8.2	Uraian Jabatan a. Analisa Jabatan b. Analisa Beban Kerja	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
000.8.3	Ketatalaksanaan a. Proses Bisnis b. Standar Pelayanan c. Standar Operasional Prosedur d. Pelayanan Publik	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
000.8.4	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi a. Budaya Kerja b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN									
000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang	
000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang	
000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian hasil pengkajian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang	

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5	6	7	8		
				Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum					
000.9.4		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian, dan pengembangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang		
000.9.5		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang			
000.9.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a. Data b. Statistik c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang			
000.9.7		Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang			
000.9.8		Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang			
000.9.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang			
000.9.10		Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang			

W

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		PEMERINTAHAN											
100.1		OTONOMI DAERAH											
100.1.2		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.1.3		Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Terbatas	V	V	V	-	V	-	V	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.1.4		Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga	Terbatas	V	V	V	-	V	-	V	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.1.5		Otonomi khusus dan daerah istimewa	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.1.6		Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	V	V	V	-	V	-	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.1.7		LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.2		PEMERINTAHAN UMUM											
100.2.1		Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah b. Fasilitasi Kecamatan c. Fasilitasi Pelayanan Umum	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah b. Batas Antar Daerah Wilayah c. Penataan Batas Wilayah Antar Kec. antar Kelurahan dengan Kecamatan, Kelurahan antar Kecamatan d. Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
100.3	HUKUM								
100.3.1	Program Legislasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan: Rancangan Peraturan Daerah Naskah Akademik, rancangan awal sampai akhir dan Telaah hukum	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah a. Keputusan / Ketetapan Bupati b. Keputusan Sekretaris Daerah c. Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
100.3.4	Instruksi / Surat Edaran a. Instruksi / Surat Edaran Kabupaten b. Instruksi / Surat Edaran Eselon II	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

W

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
100.3.5	Surat Perintah a. Surat Perintah Bupati b. Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
100.3.6	Standar / Pedoman / Prosedur Kerja/ Petunjuk/Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
100.3.7	Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerja sama a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
100.3.8	Dokumentasi Hukum	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
100.3.9	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
100.3.10	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum Pidana, Perdata, PTUN dan Agama	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum a. Pidana Kasus/ sengketa pidana b. Perdata Kasus/ sengketa perdata c. Tata Usaha Negara d. Perburuhan e. Arbitrase f. Sengketa Adat	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
100.3.12	Perijinan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) a. Hak Cipta b. Hak Paten c. Hak Desain Industri d. Hak Rahasia Dagang e. Hak Merk	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
200	POLITIK									
200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara b. Wawasan Kebangsaan c. Bela Negara d. Nilai Sejarah Kebangsaan e. Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200.1.5	Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik d. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang memperoleh kursi e. Parpol yang tidak memperoleh Kursi f. Pemerintah Daerah g. Database Parpol h. Pendidikan Budaya Politik i. Pemilihan Umum	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	
200.1.6	Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesejahteraan Perekonomian b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter c. Perilaku Perekonomian Masyarakat d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	
200.2	PEMILU									
200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	
200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih b. Daftar Pemilih Sementara (DPS) c. Daftar Pemilih Tambahan d. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu a. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik b. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik c. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan d. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan Faktual	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu a. Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota b. Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten c. Peta Daerah Pemilihan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
200.2.5	Pencalonan Pemilu a. Petunjuk teknis pencalonan b. Surat pencalonan pendaftaran c. Daftar bakal calon d. Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon e. Dokumen verifikasi administrasi f. Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
200.2.6	Kampanye Pemilu a. Keputusan KPU tentang penetapan Jadwal Kampanye b. Nama juru kampanye/pelaksana c. Peringatan tertulis/penghentian kampanye	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200.2.7	Dana Kampanye a. Pedoman audit dana kampanye b. Laporan dana kampanye peserta pemilu c. Laporan hasil audit dana kampanye	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara b. Master surat suara c. Surat suara yang terpakai d. Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah dan tidak digunakan) e. Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu a. Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu b. Jawaban dan kesimpulan termohon c. Salinan Putusan lembaga peradilan	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN								
300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja a. Tata Operasional Polisi Pamong Praja b. Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	
300.1.4	Perlindungan Masyarakat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	
300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN									
300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian dan Pertolongan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasaryarakatan a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan b. Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan c. Pemasaryarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan d. Pemasaryarakatan Pencarian dan Pertolongan Sosialisasi dan Penyuluhan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.8	Operasi Komunikasi a. Operasi Peralatan Komunikasi b. Operasi Peralatan Deteksi Dini c. Registrasi BEACON	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi a. Laporan Harian b. Laporan Bulanan c. Laporan Tahunan d. Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT									
400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL									
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A
400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum a. Data Gender b. Advokasi dan fasilitasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A
400.2.3	Perlindungan Perempuan Kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, Korban perdagangan a. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan b. Data perlindungan perempuan	Terbatas	V	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pementu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Advokasi dan fasilitasi d. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan e. Sistem aplikasi dan jaringan informasi Gender f. Analisis dan penyajian informasi gender g. Partisipasi publik	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A
400.2.4	Perindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan terhadap anak, Anak berkebutuhan khusus, dan hukum a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak b. Data perlindungan anak c. Advokasi dan fasilitasi d. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak e. Partisipasi publik	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A
400.2.5	Tumbuh Kembang Anak a. Pemenuhan Hak Anak b. Data Klaster Hak Anak c. Data tumbuh kembang anak e. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak f. Penyelenggaraan parenting pola asuh d. Advokasi dan fasilitasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A
400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB dan P3A		
400.3	PENDIDIKAN											
400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif) b. Pelatihan Sosial c. Peringatan Hari anak d. Block Grant	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
400.3.3	Pendidikan Masyarakat a. Penyelenggaraan Program b. Penilaian dan pemberian bantuan sosial c. Pembinaan Program d. Lomba/Pemberian Penghargaan e. Pameran f. Rakor g. Sosialisasi h. Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama a. Kurikulum, bahan ajar b. Block Grant c. Pelatihan, Bimtek, sosialisasi, d. Lomba, penghargaan, penganugerahan e. Bantuan operasional sekolah (BOS) f. Bantuan Siswa Miskin	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus a. Bahan Ajar b. Petunjuk Teknis c. Block grant d. Sosialisasi, bimtek e. Lomba, sayembara, jambore, festival f. Kurikulum/bahan pembelajaran g. Alat bantu pembelajaran h. Pendataan i. Kelembagaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik a. Pendataan dan Pemetaan b. Uji Kompetensi Guru c. Sertifikasi Guru	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	d. Penilaian prestasi kerja guru dan Pengawas Sekolah e. Penghargaan guru dan tenaga Kependidikan f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik g. Block grant h. Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.3.11	Penilaian Pendidikan a. Penilaian Akademik b. Penilaian Non Akademik c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan a. Data peserta didik, pendidik dan tenaga tenaga kependidikan b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan a. Prasarana Pendidikan b. Sarana Pendidikan c. Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
400.4	KEOLAHRAGAAN									
400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan a. Pendidikan Dasar dan Menengah b. Pendidikan Tinggi c. Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi a. Olahraga Massal b. Olahraga Tradisional c. Olahraga Petualangan, tantangan dan wisata	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga a. Olahraga Pendidikan b. Olahraga Rekreasi c. Olahraga Prestasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus a. Olahraga Tradisional b. Layanan Khusus	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga a. Kemitraan Keolahragaan b. Penghargaan Olahraga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga a. Pembibitan Olahraga b. Kompetisi c. IPTEK Olahraga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a. Tenaga Keolahragaan b. Organisasi Keolahragaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga a. Industri Olahraga b. Promosi Olahraga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.4.10	Olahraga Prestasi a. Daerah b. Nasional c. Internasional	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga a. Standardisasi Keolahragaan b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan c. Infrastruktur Olahraga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.5	KEPEMUDAAN									
400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda a. Penelusuran (Duta Kepemudaan) b. Pengkajian c. Pengembangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda a. Wawasan Kebangsaan b. Wawasan Lingkungan c. Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda a. Kapasitas Iman dan Taqwa b. Kapasitas IPTEK c. Pemanfaatan IPTEK	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda a. Pengkajian b. Pengembangan c. Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	

KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			1	2	3	4	5	6		
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda a. Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan b. Kesukarelawanan. Pengembangan, Kepedulian, Pendampingan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.5.7	Kewirausahaan a. Kelembagaan b. Pengaderan c. Perintisan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan c. Pemberdayaan Organisasi Kepejajaran d. Pengawasan Kepramukaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.5.9	Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda a. Standarisasi b. Infrastruktur Pemuda	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.5.10	Kemirraan dan Penghargaan Pemuda a. Kemirraan b. Penghargaan Pemuda	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
400.6	KEBUDAYAAN									
400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman a. Registrasi Nasional b. Pelindungan c. Pengembangan dan Pemanfaatan d. Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman a. Pembinaan Seni Pertunjukan b. Pembinaan Seni Rupa c. Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film d. Dokumentasi dan Publikasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya a. Sejarah b. Pemetaan Nilai c. Verifikasi dan Perumusan Nilai d. Dokumentasi dan Publikasi e. Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah f. Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya a. Internalisasi nilai budaya b. Kekayaan budaya c. Warisan budaya nasional dan dunia d. Diplomasi budaya	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata	
400.7	KESEHATAN									
400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar a. Pelayanan kedokteran keluarga b. Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer c. Pelaksanaan kesehatan primer d. Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas e. Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit f. ICD 10, Destistry & Stomatology g. Infeksi menular lewat transfusi darah h. Penyakit mulut di tingkat primer i. Pembiayaan darah j. Penggunaan darah rasional k. Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring l. Pelayanan kesehatan daerah terpencil m. Akreditasi puskesmas n. Puskesmas berprestasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan a. Pelayanan kesehatan rujukan b. Pelayanan kedokteran, organisasi Profesi, konsorsium upaya kesehatan c. Pelayanan rumah sakit privat d. Pelayanan kesehatan RS khusus e. Pelayanan kesehatan RS pendidikan f. Pelayanan pasien jaminan kesehatan g. Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa h. Badan pengawas rumah sakit i. Perizinan dan penetapan RS kelas A dan Penanaman Modal Asing (PMA) j. Akreditasi RS, fasilitas kesehatan lain	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik a. Pelayanan Keperawatan Dasar b. Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit c. Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit umum d. Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit khusus e. Bina pelayanan kebidanan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan a. Mikrobiologi dan imunologi b. Patologi dan toksikologi c. Radiologi d. Perizinan dan sertifikasi e. Sarana dan prasarana kesehatan f. Peralatan medis di faskes g. Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	
400.7.6	Kesehatan Jiwa a. Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan b. Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan c. Etikolegal dan asesmen d. Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya e. Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra a. Surveilans dan respon kejadian luar biasa b. Imunisasi c. Karantina kesehatan dan kesehatan di Pelabuhan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung a. Pengendalian tuberkolosis b. Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual c. Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut d. Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan e. Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang a. Pengendalian malaria b. Pengendalian arbovirus c. Pengendalian zoonosis d. Pengendalian diare dan infeksi saluran e. Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular a. Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah b. Pengendalian penyakit diabetes mellitus dan penyakit metabolik c. Penyakit kanker d. Penyakit kronis dan generatif e. Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	
400.7.11	Penyehatan lingkungan a. Penyehatan air dan sanitasi dasar b. Pemukiman dan tempat umum c. Kawasan dan sanitasi darurat d. Higien sanitasi pangan e. Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.13	Gizi a. Gizi makro b. Gizi mikro c. Gizi klinik dan dietetik d. Konsumsi makanan dan jasa makanan e. Kewaspadaan gizi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.14	Kesehatan ibu a. Kesehatan ibu hamil b. Kesehatan ibu bersalin dan nifas c. Kesehatan maternal d. Keluarga Berencana e. Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.15	Kesehatan anak a. Kelangsungan hidup bayi b. Kelangsungan balita dan pra sekolah c. Kewaspadaanpenanganan balita beresiko d. Kualitas hidup anak usia sekolah remaja e. Perlindungan kesehatan anak	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer a. Kesehatan tradisional keterampilan b. Kesehatan tradisional ramuan c. Kesehatan alternatif, komplementer d. Penapisan dan kemitraan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga a. Pelayanan kesehatan kerja b. Kapasitas kerja c. Lingkungan kerja d. Kemitraan kesehatan kerja e. Kesehatan perkotaan f. Kesehatan olahraga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan a. Harga obat publik b. Pengadaan obat c. Perbekalan kesehatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan a. Alat kesehatan b. Produsen dan distributor alkes dan obat c. Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.20	Kefarmasian a. Pelayanan kefarmasian b. Farmasi klinis c. Farmasi Komunitas d. Penggunaan obat rasional	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian a. Obat tradisional b. Kosmetik dan makanan c. Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi khusus d. Kemandirian obat dan bahan baku obat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan a. Surat keterangan b. Sertifikasi dan perijinan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan a. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan b. Tanggap darurat dan pemulihan c. Pemantauan dan informasi d. Penanggulangan krisis kesehatan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan e. Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan a. Tersedianya data NHA setiap tahun b. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.25		Intelegensia Kesehatan a. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan b. Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.26		Kesehatan Haji a. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji b. Peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.27		Promosi Kesehatan a. Sarana Promosi Kesehatan b. Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran c. Pengembangan pesan promosi kesehatan d. Hari Kesehatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.28		Data dan Informasi a. Statistik kesehatan b. Analisis dan desiminasi informasi c. Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen a. Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik b. Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen c. Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen d. Obat Asli Indonesia	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya a. Penilaian keamanan pangan b. Standardisasi produk pangan c. Inspeksi dan sertifikasi produk pangan d. Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan e. Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.7.31	Rekam Medis a. Statistik kesehatan b. Analisis dan desiminasi informasi c. Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Kesehatan - RSUD Soediran Mangun Sumarso
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN								
400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
400.8.2	Fasilitasi a. Data Forum Komunikasi Umat Beragama b. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan kepercayaan c. Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan kepercayaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. Kasus Keagamaan e. Kasus aliran kepercayaan	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME a. Kelembagaan dan kepercayaan b. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama c. Komunitas Kepercayaan d. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional e. Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
400.9	SOSIAL								
400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak a. Kesejahteraan sosial anak balita b. Kesejahteraan sosial anak terlantar c. Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum d. Kesejahteraan sosial anak dengan kebutuhan khusus e. Kesejahteraan sosial anak membutuhkan kebutuhan perlakuan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial
400.9.3	Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penyakit kronis netra dan rungu wicara, mental b. Kelembagaan dan advokasi sosial c. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial a. Gelandangan, pengemis dan pemulung b. Tuna susila dan korban trafficking perempuan c. Warga binaan lembaga pemasyarakatan d. Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial	
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial	
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia a. Pelayanan sosial dalam dan luar panti b. Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga c. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial	
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak kekerasan dan Tenaga Migran	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial a. Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan b. Tanggap darurat meliputi bantuan darurat advokasi sosial c. Pemulihan sosial : penguatan sosial, reintegrasi sosial d. Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah kerjasama non pemerintah	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Dinas Sosial	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.9.10	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam a. Kesiapsiagaan dan mitigasi b. Tanggap darurat : bantuan darurat, advokasi sosial c. Pemulihan sosial dan penguatan sosial d. Kerjasama	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Sosial
400.9.11	Jaminan Sosial a. Seleksi dan verifikasi b. Asuransi kesejahteraan sosial kelembagaan, pengelolaan premi c. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan d. Kerjasama	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial a. Ketahanan keluarga b. Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan c. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial d. Kemitraan dunia usaha e. Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DPPKB dan P3A
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan a. Identifikasi dan analisis b. Pengembangan kapasitas c. Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	d. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas e. Bantuan Langsung f. Kerjasama Kelambagaan									
400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial a. Penghargaan dan kejajharaan keluarga pahlawan b. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan c. Pengembangan kesetiakawanan sosial d. Pengelolaan taman makam pahlawan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	
400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan c. Fasilitas Permusyawaratan Desa d. Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa e. Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a. Lembaga Masyarakat b. Pembangunan Partisipatif c. Pendataan Potensi Masyarakat d. Pengembangan Kawasan Perdesaan e. Pelatihan Masyarakat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a. Budaya Nusantara b. Pemberdayaan Perempuan c. Pemberdayaan, Kesejahteraan Keluarga d. Kesejahteraan Sosial e. Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat a. Usaha Pertanian dan Pangan b. Usaha Per kreditan dan Simpan Pinjam c. Produksi dan Pemasaran d. Usaha Ekonomi dan Keluarga e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan a. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan b. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan c. Fasilitas Prasarana, Sarana Perdesaan d. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian teknologi perdesaan e. Pemasarakan dan Kergjasama Teknologi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (BumDes)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pementu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
400.11	PERTAMAMAN DAN PEMAKAMAN											
400.12	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
400.12.2	Pendaftaran Penduduk a. Identitas Penduduk b. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara d. Pendataan Penduduk Rentan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi		Terbatas	V	V	V	-	V			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
400.12.3	Pencatatan Sipil a. Kelahiran dan Kematian b. Perkawinan dan Perceraian c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak d. Pencatatan Kewarganegaraan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi		Terbatas	V	V	V	-	V			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan c. Pengelolaan data Administrasi Kependudukan d. Penyajian dan Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi		Terbatas	V	V	V	-	V			Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
400.12.5		Pengembangan Kebijakan Kependudukan a. Kuantitas Penduduk b. Kualitas Penduduk c. Mobilitas Penduduk d. Perlindungan dan Pemberdayaan e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
400.12.6		Penyerasian Kependudukan a. Indikator Kependudukan b. Proyeksi Penduduk c. Perencanaan Kependudukan d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
400.13	KELUARGA BERENCANA												
400.13.1		Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A			
400.13.2		Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a. Pengumpulan dan pengolahan data b. Evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A			
400.13.3		Facilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a. Penyiapan fasilitas b. Evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A			
400.13.4		Profil dan proyeksi penduduk a. Penyiapan fasilitas b. Evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A			

KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk a. Penyiapan fasilitas b. Evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk a. Pemanfaatan profil dan proyeksi b. Pemanfaatan parameter	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.7	Pengembangan Sistem a. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal b. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.8	Pengembangan Materi a. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal b. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal b. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.10	Analisis Sosial	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.11	Analisis Ekonomi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria a. Peningkatan akses keluarga berencana pria b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.11.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	
400.13.38	Pelebangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kejakaan	Pelaksana Kejakaan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan a. Pengembangan institusi b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A Dinas PMD
400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan a. Pengembangan mekanisme operasional b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan a. Perumusan pola sistem b. Monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.51	Analisis dan evaluasi a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data a. Pengembangan sistem aplikasipenduduk b. Pengelolaan bank data	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi b. Pemeliharaan Infrastruktur teknologi informasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A
400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi a. Dokumentasi dan perpustakaan Pengelolaan situs BKKB dan media konferensi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKB Dan P3A

W

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400.14		HUBUNGAN MASYARAKAT									
400.14.1		Keprotokolan a. Penyelenggaraan acara kedinasan b. Buku tamu Keprotokolan c. Agenda kegiatan pimpinan daerah d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah	
400.14.2		Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah	
400.14.3		Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/ rekaman suara/ multi media	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah	
400.14.4		Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan a. Kliping koran b. Brosur /Leaflet/poster /plakat c. Pengumuman / pemberitaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah	
400.14.5		Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah a. Hubungan antar lembaga pemerintahan b. Hubungan antar lembaga pemerintahan c. Hubungan dengan perusahaan d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah e. Forum Kehumasan f. Hubungan dengan Media Massa	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah	
400.14.6		Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah
400.14.8	Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah
400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah
400.14.10	Pameran /sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah
400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah
400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Humas Sekretariat Daerah
500	PEREKONOMIAN								
500.1	KETAHANAN PANGAN								
500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan a. Ketersediaan Pangan b. Akses Pangan c. Kerawanan Pangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pementu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan a. Distribusi Pangan b. Harga Pangan c. Cadangan Pangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.1.4	Pengankaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan a. Konsumsi Pangan b. Pengankaragaman Pangan c. Keamanan Pangan Segar	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan a. Dewan Ketahanan Pangan b. Penghargaan Ketahanan Pangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.1.7	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.1.8	Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.2	PERDAGANGAN									
500.2.1	Keputusan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha b. Bina Usaha Jasa Perdagangan c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan d. Informasi Perusahaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
	e. Pelaku Pasar f. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah g. Fasilitas Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah h. Pengembangan Produk Lokal i. Pencitraan Produk Dalam Negeri j. Pengembangan Sarana Distribusi k. Pengelolaan Sarana Distribusi l. Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik m. Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik n. Informasi Pasar o. Informasi Hasil Industri p. Barang Strategis q. Bahan Pokok Agro	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen a. Kelembagaan dan informasi standar b. Kerjasama Standarisasi c. Perumusan dan penerapan standar d. Tata Usaha e. Kerjasama, informasi, dan publikasi f. Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pententu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	g. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha h. Fasilitasi Kelembagaan i. Produk pertambangan dan aneka industri j. Produk pertanian, kimia dan kehutanan k. Jasa l. Kerjasama m. Sarana dan Kerjasama n. Kelembagaan dan penilaian o. UTTP dan Standar Ukuran p. Pengawasan q. Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran r. Balai Pengujian UTTP	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi a. Pengkajian pasar b. Pengawasan Transaksi c. Pengawasan Keuangan dan Audit d. Pengkajian pasar e. Pengembangan Pasar f. Sistem Informasi g. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang h. Pengawasan pasar lelang i. Pengawasan sistem gudang	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.2.5	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.2.6	Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi b. Tata Laksana Koperasi dan UKM c. Keanggotaan Koperasi d. Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.3	Produksi a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kehutanan dan Perkebunan c. Perikanan dan Peternakan d. Industri Kerajinan dan Pertambangan e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.4	Pembiayaan a. Program pendanaan b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam c. Urusan Permodalan d. Asuransi dan Jasa Keuangan e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha a. Perdagangan Dalam Negeri b. Ekspor dan Impor c. Sarana dan Prasarana Pemasaran d. Kemitraan dan Jaringan Usaha e. Informasi dan Publikasi Bisnis f. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Pengembangan Kewirausahaan b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM c. Peran Serta Masyarakat d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan e. Advokasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha a. Produktifitas dan Mutu b. Restrukturisasi Usaha c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) d. Fasilitas Investasi UKMK e. Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK a. Penelitian Koperasi b. Penelitian UKM c. Penelitian Sumber Daya d. Pengembangan Perkaderan UKM	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL) a. Peraturan Perundang-Undangan b. Sarana dan Prasarana	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bid. Kop. dan Usaha Mikro Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pententu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.4	KEHUTANAN								
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
500.5.2	Perikanan Tangkap a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap b. Rancang Bangun dan Kelaiikan Kapal Perikanan c. Rancang Bangun dan Kelaiikan Alat Tangkap Ikan d. Pendaftaran Kapal Perikanan e. Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan f. Perbantuan, Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan g. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan h. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan i. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan j. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan k. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan l. Kelembagaan Usaha Penangkapan m. Investasi dan Permodalan Usaha n. Kenelayanan o. Pembinaan Pengelolaan Usaha p. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pementu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.5.3	Perikanan Budidaya a. Potensi Lahan dan Air b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar c. Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar d. Perbenihan Skala Kecil e. Informasi dan Distribusi Pembenihan f. Budidaya Air Tawar g. Budidaya Ikan Hias h. Sertifikasi Budidaya Perikanan i. Data dan Statistik Perikanan Budidaya j. Hama dan Penyakit Ikan k. Perlindungan Lingkungan Budidaya l. Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya m. Kewirausahaan Budidaya n. Pelayanan Usaha Budidaya o. Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan p. Promosi Usaha dan Budaya	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Standarisasi Pengolahan Hasil b. Pengembangan Produk c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah d. Industri Pengolahan e. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil f. Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi g. Promosi dan Jaringan Ikan Hias h. Pengembangan Industri	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	i. Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi j. Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri k. Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri l. Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri m. Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri n. Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri o. Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri p. Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri q. Pengembangan Ekspor r. Pengembangan Impor s. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri t. Pelayanan Usaha u. Kemitraan Usaha v. Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran w. Investasi dan Permodalan x. Informasi dan Promosi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yuridiksi b. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I c. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II d. Informasi dan Evaluasi Spasial e. Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi f. Konservasi Wawasan g. Konservasi Jenis Ikan	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.5.6	h. Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan i. Mitigasi Bencana Lingkungan j. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan k. Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut l. Rehabilitasi dan Reklamasi m. Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil n. Pengelolaan Ekosistem Pulau Terkecil o. Investasi dan Promosi Pulau Terkecil p. Sarana dan Prasarana Pulau Terkecil q. Akses Permodalan r. Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi s. Sosial Budaya Masyarakat t. Pengembangan Usaha	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
	a. Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat b. Pengawasan Penangkapan Wil. Timur c. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran d. Pengawasan Usaha Budidaya e. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi f. Pengawasan Pencemaran Perairan g. Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil h. Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati i. Logistik dan Operasional Wilayah Barat j. Logistik dan Operasional Wilayah Timur k. Perawatan Kapal Pengawas l. Pengawasan Kapal Pengawas m. Sistem Pemantauan								

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	n. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan o. Pemantauan Sumber Daya Perikanan p. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan q. Penyidikan r. Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal s. Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan t. Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
500.5.7	Karantina Ikan a. Pemeriksaan Ikan b. Penahanan c. Pengasin d. Pengamatan e. Pengakuan f. Penolakan g. Pemusnahan h. Persyaratan lalu Lintas Pemasukan i. Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran j. Permohonan Sertifikat k. Pemasukan Formulir l. Pemasukan Sertifikat m. Evaluasi dan Monitoring Sertifikat o. Surat Perintah p. Rekomendasi q. Penutupan Suatu Area r. Pelanggaran Lalu Lintas Ikan s. Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan t. Pengawasan Pelaksanaan Operasional u. Instalasi Karantina Sementara v. Lokasi Karantina	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.6	PERTANIAN									
500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.2	Perindungan hortikultura a. Perindungan Tanaman Buah b. Perindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat c. Perindungan Tanaman Florikultura d. Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.3	Perbenihan Hortikultura a. Penilaian Varietas b. Pengawasan Mutu Benih c. Budaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan a. Basis Data Lahan b. Pengendalian Lahan c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi a. Pengembangan Sumber Air b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi air c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup d. Kelembagaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penggak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.6.6	Pembiayaan Pertanian a. Pembiayaan Program b. Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama c. Pembiayaan agribisnis d. Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.7	Pupuk Pestisida a. Pupuk Organik dan Pembenah Tanah b. Pupuk Anorganik c. Pestisida d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian b. Pengawasan dan Peredaran Alat c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih b. Produksi Benih Sereal c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi d. Kelembagaan Benih	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.10	Budidaya Sereal a. Padi Irigasi dan Rawa b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering c. Jagung d. Sereal lain	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi a. Kedelai b. Ubi Kayu c. Aneka Kacang d. Aneka Umbi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.6.12	Tanaman Pangan a. Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan b. Dampak perubahan iklim c. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan d. Pengendalian Hama Terpadu	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.13	Pasca Panen Tanaman Pangan a. Padi b. Jagung dan Serealia lain c. Kedelai dan Aneka Kacang d. Aneka Umbi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian a. Tanaman Pangan b. Hortikultura c. Perkebunan d. Peternakan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.15	Mutu dan Standarisasi a. Standarisasi b. Penerapan, Pengawasan Jaminan Mutu c. Akreditasi dan Kelembagaan d. Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi a. Kemitraan dan Kewirausahaan b. Investasi c. Promosi Dalam Negeri d. Promosi Luar Negeri	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.17	Pemasaran Domestik a. Informasi Pasar b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga c. Sarana dan Kelembagaan Pasar d. Jaringan Pemasaran	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

W

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pementu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan a. Hasil Penelitian dan Pengembangan b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.20	Diseminasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar, Workshop b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) a. Hak Cipta b. Hak Paten Sederhana c. Hak Paten biasa d. Hak Merek e. Pendaftaran Varietas Tanaman f. Permohonan Hak PVT/TT Tanaman Semusim dan Tahunan g. Permohonan HKI yang ditolak	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian a. Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) b. Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan) c. Sarana III (bidang bibit, karakas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.28	Pelayanan Hukum a. Sertifikasi b. Pertimbangan Hukum	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.6.29	Karantina Pertanian a. Karantina Tumbuhan b. Karantina Hewan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.6.30	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.6.31	Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
500.7	PETERNAKAN									
500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan a. Perbibitan Ternak b. Pakan Ternak c. Budidaya Ternak d. Kesehatan Hewan e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	
500.7.3	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	
500.7.4	Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	
500.8	PERKEBUNAN									
500.8.1	Kebijakan di Bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.8.2	Tanaman Semusim a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim b. Perbenihan Tanaman Semusim c. Teknologi Budidaya Tanaman Semusim d. Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.8.3	Tanaman Rempah dan Penyegar a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah b. Perbenihan Tanaman rempah, penyegar c. Budidaya Tanaman Rempah, Penyegar d. Pemberdayaan dan Kelembagaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.8.4	Tanaman Tahunan a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan b. Perbenihan Tanaman Tahunan c. Budidaya Tanaman Tahunan d. Pemberdayaan dan Kelembagaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.8.5	Perindungan Perkebunan Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan: a. Tanaman Semusim, Perindungan Perkebunan b. Tanaman Rempah dan Penyegar c. Tanaman Tahunan d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar b. Pascapanen Tanaman Tahunan c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan d. Gangguan Usaha dan Penanganan konflik	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.8.8	Evaluasi Perkebunan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
500.9	PERINDUSTRIAN								
500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan
500.9.2	Iklm Usaha dan Kerja Sama a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan
500.9.3	Promosi Industri a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan
500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi d. Industri Kecil dan Menengah	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Pengak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri a. Kebijakan Industri b. Perpajakan dan Tarif c. Pengembangan Model Industrial	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup a. Industri Hijau b. Lingkungan Hidup c. Energi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri.	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan	
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
500.11	PERHUBUNGAN									
500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan a. Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang b. Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Penetapan lokasi terminal barang utama d. Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal e. Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi f. Jaringan lintas jaringan jalan primer g. Penetapan kelas jalan primer h. Kualifikasi teknis petugas terminal i. Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan a. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan b. Pengembangan transportasi jalan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor a. Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor b. Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor c. Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor d. Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor a. Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor b. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor d. Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.11.6	Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas a. Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.7	Perlengkapan Jalan a. Pedoman teknis perlengkapan jalan b. Penimbangan kendaraan bermotor di jalan c. Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor d. Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor e. Pengadaan, pemasaan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.8	Angkutan Penumpang a. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi b. Izin trayek antar kota antar provinsi c. Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek lintas batas kota/provinsi d. Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum e. Pemberian subsidi angkutan umum f. Angkutan perintis g. Penghargaan perusahaan angkutan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.9	Angkutan Barang a. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan b. Tarif angkutan barang c. Izin operasi angkutan barang tertentu d. Pembinaan angkutan barang e. Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.11.10	Monitoring Operasional a. Pengendalian operasional Lalu Lintas dan angkutan jalan b. Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
	c. Berkas Pelanggaran Perda									
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil a. Pedoman Teknis b. Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh PPNS c. Bimtek PPNS d. Penguksulan peningkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.21	Tarif dan Keperintisan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
500.11.24	Angkutan Perkotaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Pemegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.11.26	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.31	Audi Keselamatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
500.11.33	Parkir	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.2	Telekomunikasi a. Layanan Jaringan Telekomunikasi b. Layanan Jasa Telekomunikasi c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika d. Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.3	Penyiaran a. Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi b. Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, Kewajiban Universal a. Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah b. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah c. Layanan Khusus Penyiaran d. Pelayanan Kewajiban Universal e. Pengembangan Infrastruktur	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.5	Pengendalian Informatika a. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi b. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi c. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran d. Pencegahan dan Penertiban	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.12.6	e- Government a. Tata Kelola e-Government b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government c. Interoperabilitas dan Interkoneksi d. Aplikasi Layanan Pemerintahan e. Aplikasi Layanan Publik	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.7	e- Business a. Tata Kelola e-Business b. Teknologi dan Infrastruktur e-Business c. Interoperabilitas dan Interkoneksi d. Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika b. Industri Perangkat Informatika Pengguna c. Industri Perangkat Lunak d. Industri Konten Multimedia	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.10	Keamanan Informasi a. Tata Kelola Keamanan Informasi b. Teknologi Keamanan Informasi c. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi d. Penyidikan dan Penindakan e. Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.11	Komunikasi Publik a. Tata Kelola Komunikasi Publik b. Pengelolaan Opini Publik c. Layanan Komunikasi Publik	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan b. Informasi Perekonomian c. Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.13	Pengelolaan Media Publik a. Media Cetak b. Media Online c. Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.14	Kemitraan Komunikasi a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.15	Infrastruktur Informatika a. Jaringan b. Piranti c. Keamanan Informasi	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data a. Portal dan Konten b. Pengumpulan dan Pengolahan Data c. Pengembangan Aplikasi	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.17	Pusat Kerjasama a. Kerjasama daerah b. Kerjasama Bilateral c. Pengembangan Aplikasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat a. Pelayanan Informasi b. Hubungan Masyarakat c. Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.12.19		Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
500.13		PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
500.13.1		Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	
500.13.2		Pengembangan Destinasi Wisata a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata b. Pengembangan Daya Tarik Wisata c. Industri Pariwisata d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, Event	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	
500.13.3		Pemasaran Pariwisata a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata b. Promosi Pariwisata Luar Negeri c. Pencitraan Indonesia	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	
500.13.4		Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya a. Pengembangan industri Perfilman b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik c. Pengembangan Seni Rupa	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	
500.13.5		Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media b. Desain dan Arsitektur c. Kerjasama dan Fasilitasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES				DASAR PERTIMBANGAN	UNT PENGOLOH	
				Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik			Penegak Hukum
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.13.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif c. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
500.15		KETENAGAKERJAAN								
500.15.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.2		Perencanaan Tenaga Kerja a. Perusahaan Pemerintah b. Perusahaan Swasta	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi a. Penerapan Standar Kompetensi b. Pengembangan Standarisasi Kompetensi c. Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan d. Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan e. Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja a. Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan d. Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan e. Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan a. Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah b. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta c. Tenaga Pelatihan d. Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.6	Bina Pemagangan a. Pemagangan Dalam Negeri b. Pemagangan Luar Negeri c. Perizinan dan Advokasi Pemagangan d. Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan a. Pengembangan Promosi dan Kerjasama b. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas c. Pengembangan Pengukuran dan Kajian d. Pengembangan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja a. Informasi Pasar Kerja b. Analisis Pasar Kerja c. Bursa Kerja d. Analisis Jabatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri a. Antar Kerja b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan d. Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pementu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja a. Tenaga Kerja Mandiri, Sektor Informal b. Pengembangan Padat Karya c. Terapan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.11	Standarisasi Profesi a. Sistem Informasi dan Registrasi b. Pembakuan Akreditasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama b. Perjanjian Kerja c. Kesejahteraan Pekerja d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasayaran Hubungan Industrial a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha b. Kelembagaan Hubungan Industrial c. Pemasayaran Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pengupahan b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial a. Pencegahan Perselisihan b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Keputusan	Pelaksana Keputusan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a. Pengawasan Norma Kerja b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan b. Pengawasan Norma Kerja Anak Kerjasama Lintas Sektorial c. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan b. Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran c. Kesehatan Kerja, Lingkungan Kerja dan d. Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya e. Kelembagaan, Keahlian dan Sistem	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.20	Bina Penegakan Hukum a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil d. Kerjasama Penegakan Hukum	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.15.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a. Analisis dan Standardisasi bidang K 3 b. Hasil kajian, pelaksanaan dan penerapan teknologi dan alih c. Bimtek dan Evaluasi Pengkajian K 3 d. Bimtek dan Evaluasi Pelayanan K 3	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.15.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 a. Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b. Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM, Kompetensi K3 c. Kerjasama Tingkat Nasional d. Kerjasama Tingkat Regional e. Kerjasama Tingkat Internasional f. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.16		PENANAMAN MODAL								
500.16.1		Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
500.16.2		Perencanaan Penanaman Modal a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya b. Perencanaan Industri Manufaktur c. Perencanaan Jasa dan Kawasan d. Perencanaan Infrastruktur	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal a. Deregulasi Penanaman Modal b. Pengembangan Potensi Daerah c. Pemberdayaan Usaha d. Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan e. Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha f. Pemberdayaan Usaha Pelayaran Usaha	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
500.16.4	Promosi Penanaman Modal a. Pengembangan Promosi b. Analisis Strategi Promosi c. Fasilitas Promosi Luar Negeri d. Promosi Sektoral e. Fasilitas Promosi Daerah f. Pamoran dan Sarana Promosi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal a. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral b. Kerja Sama Regional c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a. Pemantauan Penanaman Modal b. Data Realisasi Penanaman Modal c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal d. Fasilitas Penyelesaian Masalah e. Pengawasan Penanaman Modal f. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal a. Pelayanan Aplikasi b. Pelayanan Perijinan c. Pelayanan Konsultasi Perijinan d. Pelayanan Non Perijinan e. Pelayanan Fasilitas	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500.17	PERTANAHAN	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan a. Fasilitasi Pengadaan Tanah b. Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan c. Data dan Informasi Pertanahan d. Advokasi dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
500.18	TRANSMIGRASI									
500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi a. Fasilitasi Pengadaan Tanah b. Pengurusan Legalitas Tanah c. Dokumentasi Pertanahan d. Advokasi Pertanahan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	
500.18.3	Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi a. Penyiapan Lahan b. Penyiapan Sarana c. Penyiapan Prasarana d. Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi a. Penyiapan Calon Transmigrasi b. Penyiapan Perpindahan c. Pelaksanaan Perpindahan d. Penataan dan Adaptasi	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kejakaan	Pelaksana Kejakaan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.18.5	Partisipasi Masyarakat a. Promosi dan Motivasi b. Kerjasama Kelembagaan c. Kerjasama Antar Daerah d. Pelayanan Investasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi a. Perencanaan Teknis b. Bina Sistem Informasi c. Perencanaan Pengembangan Kawasan d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat e. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat a. Bantuan Pangan dan Kesehatan b. Fasilitas Sosial Budaya c. Pengembangan Kelembagaan d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.18.8	Pengembangan Usaha a. Kewirausahaan b. Produksi c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran d. Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana b. Pengembangan Sarana c. Pengembangan Prasarana d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500.18.10	Penyerasian Lingkungan a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN								
600.1	PEKERJAAN UMUM								
600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air a. Perencanaan Wilayah Sungai b. Kelembagaan c. Pemanfaatan Sumber Daya Air d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air e. Pengaturan dan Pemantauan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air b. Manajemen Mutu c. Informasi dan Data Sumber Daya Air d. Keterpaduan Pemrograman	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air a. Pengelolaan Sungai dan Pantai b. Pengelolaan Irigasi dan Rawa c. Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung d. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum

W

KODE	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES								DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum	9	10			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600.1.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air a. Sungai dan Pantai b. Irigasi dan Rawa c. Bendungan, Danau, Situ, dan Embung d. Air Tanah dan Air Baku e. Lumpur	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum			
600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan a. Keterpaduan Perencanaan b. Sistem Jaringan Jalan c. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum			
600.1.8		Pembangunan Jalan a. Standar dan Pedoman	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum			
		b. Manajemen Konstruksi c. Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainage d. Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum			
600.1.9		Preservasi Jalan a. Standar dan Pedoman b. Perencanaan Teknis c. Teknik Rekonstruksi d. Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum			
600.1.10		Pengelolaan Jembatan a. Standar dan Pedoman b. Perencanaan Teknis c. Teknik Rekonstruksi d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum			

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas	Biase/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan b. Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman a. Perencanaan Teknis b. Kawasan Permukiman Perkotaan c. Kawasan Permukiman Pedesaan d. Kawasan Permukiman Khusus e. Kelembagaan	Biase/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan a. Perencanaan Teknis b. Penataan Bangunan Gedung c. Pengelolaan Rumah Negara d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus e. Kelembagaan	Biase/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum a. Perencanaan Teknis b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan c. Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus e. Kelembagaan f. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum g. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biase/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman a. Perencanaan Teknis b. Pengelolaan Air Limbah c. Pengelolaan Persampahan d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus e. Kelembagaan f. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	
600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan a. Keterpaduan Perencanaan b. Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar c. Kemitraan	Biasa/Terbuka Terbatas	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan a. Pembiayaan Perumahan Rumah Umum b. Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro c. Perumahan d. Pola Investasi Perumahan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan a. Sumber Pembiayaan Primer b. Sumber Pembiayaan Sekunder c. Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya d. Sistem Pembiayaan Perumahan e. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan a. Keterpaduan Perencanaan b. Analisa Teknik c. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian d. Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun a. Perencanaan Teknik b. Penyediaan c. Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan d. Pengelolaan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus a. Perencanaan Teknik b. Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus c. Bimbingan teknis dan supervisi d. Penyelenggaraan bantuan swadaya e. Perencanaan Teknik f. Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni g. Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial a. Perencanaan Teknik b. Pemberian Bantuan Rumah Umum c. Fasilitas Hunian Berimbang d. Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
600.2.9	Investasi Infrastruktur a. Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur b. Sinkronisasi Investasi Infrastruktur c. Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur d. Pasar Infrastruktur	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi a. Sistem Penyelenggaraan b. Kontrak Konstruksi c. Konstruksi Berkelanjutan d. Manajemen Mutu	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi a. Kelembagaan b. Material dan Peralatan Konstruksi c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri d. Usaha Jasa Konstruksi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi a. Standar dan Materi Kompetensi b. Penerapan Kompetensi c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi d. Pengembangan Produktivitas	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi a. Peningkatan Kerjasama b. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Pengak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi b. Pengembangan Materi c. Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan a. Rakyat (PUPR) b. Antar Sektor c. Antar Wilayah	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis a. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis b. Pengembangan Infrastruktur antar Kawasan Strategis	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan a. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan b. Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan c. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Dan Pertanahan - Dinas Pekerjaan Umum	

W

r

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan a. Organisasi Sosial Masyarakat b. Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah - Dinas Lingkungan Hidup - Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan a. Pengelolaan Data b. Pengelolaan Informasi c. Pengembangan Perangkat Lunak d. Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah - Dinas Lingkungan Hidup - Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan a. Kelembagaan dan Tata Laksana b. Fasilitas Standar Pelayanan Minimal	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah - Dinas Lingkungan Hidup		
600.4.25	Standarisasi dan teknologi a. Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan b. Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan c. Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup		
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan a. Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan b. Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup		
700	PENGAWASAN									
700.1	Pengawasan Internal	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah Inspektorat		

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700.1.1	Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana Kerja Pengawas Tahunan c. Rencana Kinerja Tahunan d. Rencana, Penetapan Kinerja Tahunan e. Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO) Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur. Tindak pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tidak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut d. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat e. Laporan Penutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara g. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi h. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Review i. Good Corporate Governance (GCG)	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800	KEPEGAWAIAN								
800.1	Sumber Daya Manusia	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara a. Perencanaan Kebutuhan ASN b. Perencanaan Pertimbangan Formasi c. Penetapan Kebutuhan ASN d. Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan Klasifikasi Jabatan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai a. Formasi ASN b. Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN c. Pengumuman Kelulusan ASN d. Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima e. Penganngkatan ASN f. Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan) g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN h. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
800.1.3	Mutasi Pegawai a. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara b. Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN c. Kenalkan Pangkat/Golongan/Jabatan d. Penganngkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					Penegak Hukum	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
800.1.4	<ul style="list-style-type: none"> d. Perubahan Data Dasar/Status /Kedudukan Hukum Pegawai e. Peningjauan Masa Kerja f. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) 	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
800.1.5	<ul style="list-style-type: none"> a. Usulan Tugas Belajar / jln Belajar /Diklat / Kursus/ Magang/Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta b. Penyesuaian ijazah c. Penyusunan Sistem Karier d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja e. Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit 	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
800.1.6	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode Etik Pegawai b. Disiplin c. Pemberhentian Dengan Hormat d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat e. Pemberhentian Sementara f. Pensiun ASN Antara lain: Administrasi , Penetapan Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudyanya 	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					Penegak Hukum	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
800.1.7	Bantuan Hukum	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai a. Status Kepegawaian b. Kedudukan Kepegawaian c. Keberatan Pegawai d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian a. Pengolahan Data dan Informasi b. Pengembangan Sistem Informasi c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik d. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian a. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat b. Keangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan c. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja d. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian f. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
800.1.11	Administrasi Pegawai a. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat b. Keangkatan, Pengangkatan, dan Surat Perintah Dinas/Surat Tugas c. Cuti Sakit	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	e. Cuti Bersalin f. Cuti Tahunan g. Cuti Alasan Penting h. Cuti Besar i. Cuti Di luar Tanggungan Negara j. Karpeg/KPE/Karis/Karsu k. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasaan l. m. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi/LP2P n. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) o. Daftar Urut Keangkatan (DUK) p. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	
800.1.12	Sistem Informasi Kepegawaian a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Asuransi Pegawai/BPJS c. Tabungan Perumahan d. Bantuan Sosial e. Pakaian Dinas f. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas g. Pemberian Tali Kasih h. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Olahraga dan Rekreasi j. Rekam Medis	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah Memimbulkan kerugian yang serius terhadap Privasi, merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kepegawaian Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800.1.13	Administrasi Perseorangan a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) c. Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang diseretarkan d. Sekretaris Daerah e. ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
800.1.14	Penilaian Kompetensi a. Penilaian Kompetensi b. Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	V	V	V	-	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
800.2.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai								
800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan a. Sistem Informasi program dan pembinaan diklat b. Pedoman-pedoman kediklatan c. Kurikulum-kurikulum diklat d. Modul-modul diklat e. Panduan fasilitator f. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat g. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat h. Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat i. Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

M

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penyampaian RAPBD kepada Dewan Perwakilan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.2	Penyusunan Anggaran a. Rancangan Dokumen Pelaksanaan/RDPA Anggaran yang disetujui oleh Sekda b. DPA yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran a. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS b. Pendapatan c. Belanja d. Pembiayaan Daerah e. Dokumen Penatausahaan Keuangan f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana g. Daftar Gaji h. Kartu Gaji i. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) j. Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Rahasia	V	-	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES						DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) b. Dokumen Kebijakan Akuntansi c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan/	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan a. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Nota Kredit Bank Permintaan Pelayanan Jasa/Service c. Buku Rekening Bank d. Keputusan Pembukuan Rekening e. Pembukuan anggaran terdiri antara lain : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran Daftar Himpunan Pencairan dan Rekening Koran	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

W

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Pentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penggak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa/Pengeluaran lain b. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh dan Denda c. Keterlambatan Menyelesaikan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD meliputi : Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwasda Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dab Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu meliputi : Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja a. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu c. Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro, Berkas penyaluran biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank d. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional/PPKO Pemilu termasuk Perubahan/Pegeseran/ Revisi	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional d. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	V	V	V	-	V	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah a. Anggaran Daerah Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah a. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah b. Badan Usaha Milik Negara c. Badan Layanan Umum Daerah d. Pengelolaan Kekayaan Daerah e. Pinjam dan Obbligasi Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.14	Fasilitas Dana Perimbangan a. Fasilitas Dana Alokasi Umum b. Fasilitas Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES					DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal / Eksternal	Publik	Penegak Hukum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya e. Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah a. Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



BUPATI WONOGIRI,
JOKO SUTOPO